



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
SUB UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRO**
2. Jabatan : **KOORDINATOR PENGAWASAN BIDANG AKUNTAN NEGARA**
3. NHK : **44859**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.080.750.000**

1. Tanah Seluas 158 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/121 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/144 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 964 m2/244 m2 di PURWAKARTA, WARISAN Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 2200 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
6. Tanah Seluas 3777 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
7. Tanah Seluas 2250 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/74 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 95.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA GREAT COROLLA SEDAN Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, PEUGEOT MINIBUS Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp.



25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	52.571.667
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.267.071.667
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.117.071.667

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.